

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN INVASI AMERIKA SERIKAT Tahun 2003 TERHADAP IRAK

Intan Juwita

Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstrak

Skripsi ini membahas mengenai dampak invasi Amerika Serikat tahun 2003 terhadap Irak yang diidentifikasi pada serangan yang terjadi pada tahun 2003 yang menyebabkan terjadinya perang dengan mengakibatkan tewasnya ribuan masyarakat Irak dan juga beberapa tentara Amerika Serikat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menekankan pada metode analisis konten. Kerangka pemikiran penelitian ini berangkat dari konsep demokrasi. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa dampak yang di akibatkan oleh invasi ini cukup signifikan dalam hal tatanan politik di Irak dimana pasca invasi Irak telah berubah menjadi negara yang menganut sistem demokrasi dimana didorong oleh Amerika Serikat demi eksistensi dan kepentingan Amerika Serikat di Irak.

Kata kunci: Analisis dampak kebijakan invasi Amerika Serikat tahun 2003 terhadap Irak

Pendahuluan

Setiap negara mempunyai tujuan nasional dan kebijakan luar negerinya tergantung kebutuhan domestiknya masing-masing dimana setiap negara pasti akan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Seperti negara besar Amerika Serikat yang pasti memiliki nilai besar pada kebijakan luar negerinya. Pada masa presiden George W. Bush, arah kebijakan Amerika Serikat lebih cenderung mengutamakan *hard power* tanpa memperdulikan kecaman-kecaman yang datang dari negara lain maupun PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) (Mauna, 2005, hal. 663).

Republik Irak adalah sebuah negara di kawasan Timur Tengah, yang wilayah terbesarnya mencakup mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timurnya Gurun Suriah yang luasnya mencapai 438.052 km². Irak berbatasan langsung dengan Kuwait, Arab Saudi di selatan, Suriah dan Yordania di barat, Turki di utara, dan Iran di timur. Irak merupakan salah satu negara yang menarik untuk dikaji karena merupakan salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang seringkali menghadapi konflik perang. Kali ini Irak diintervensi oleh Amerika Serikat. Berikut ini akan sedikit diuraikan tentang faktor apa yang menyebabkan Amerika Serikat ikut campur dalam konflik yang berlangsung di Irak pada tahun 2003. (Sihbudi R. , 2007, hal. 422-425).

Perang yang seringkali terjadi di Irak hanya bernuansa ideologi dimana Amerika Serikat seringkali membawa isu tersebut ke dunia internasional yang memicu banyak respon dunia yang otomatis negara lain akan mendukung Amerika Serikat karena isu yang dibawa sangat serius seperti isu terorisme. Dengan isu tersebut Amerika dapat melakukan intervensi kepada negara tersebut contohnya seperti afganistan, yang lambat laun menjalar ke negara Irak. Mengapa Irak? Karena Amerika menganggap bahwa presiden Irak Saddam Hussein adalah presiden yang ditakuti yang telah

memerintah Irak dengan tangan besinya, tidak sedikit masyarakat Irak yang level ekonominya di bawah rata-rata, menengah maupun level atas itu semua karena masa pemerintahannya, Saddam Hussein juga dianggap sebagai penindas masyarakatnya. kemudian disinilah Amerika mempunyai peluang untuk dapat menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dengan isu terorisme dan kepemilikan senjata pemusnah massal kemudian Saddam Hussein juga menghalangi proses demokrasi di Timur Tengah, Pemimpin Irak yang dapat dikatakan tidak pro dengan Amerika maka dari itu Amerika ingin menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein dan lebih mudah menjadikan Irak negara yang demokratis (Daulay, 2009, pp. 9-28).

Kajian ini sangat menarik untuk pelajari karena menurut presiden ke 39 Jimmy Carter: Tindakan Amerika Serikat di Timur Tengah mendekati kejahatan perang karena setiap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat seringkali menewaskan warga sipil yang tidak ikut andil dalam konflik dan jikalau ada peperangan yang terjadi dengan memikirkan jalan keluar seharusnya perang adalah jalan terakhir yang diambil dan ketika perang terjadi pun Amerika Serikat seharusnya mengikuti aturan-aturan peperangan yang ada. Kemudian Presiden ke 39 itu menambahkan bahwa Amerika Serikat adalah Negara besar yang seringkali berperang jika dibandingkan dengan China yang sejak 1979 tidak pernah berperang (Maulana, 2018). Masalah yang telah terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas akan dibahas menggunakan kebijakan Luar Negeri yang pada akhirnya akan melahirkan kepentingan nasional.

Kerangka Teori

Untuk menjawab rumusan masalah dan menganalisa studi kasus dengan demikian penullis akan menggunakan teori demokrasi.

1. Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi yang seringkali dipraktikkan oleh seluruh negara dengan cara yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Demokrasi telah menjadi sebuah paradigma dalam bahasa komunikasi dunia dalam sistem pemerintah dan sistem politik yang dianggap ideal (Asshiddiqie, 2005, p. 141). Maka dari itu, menurut Ni'matul Huda (Huda, 2005, p. 259) demokrasi adalah sebuah asas dan sistem yang tidak dapat dibantah karena sistem tersebut sangat baik di dalam sistem politik maupun ketatanegaraan. Di era modern ini tidak sedikit negara yang mengklaim bahwa negaranya adalah penganut sistem demokrasi. Dari penelitian Amos J. Peaslee, pada tahun 1950, dari 83 Undang-Undang Dasar negara-negara yang diperbandingkannya, terdapat 74 negara yang konstitusinya secara resmi menganut prinsip kedaulatan rakyat (90%) (Peaslee, 1950). Kemudian menurut penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO dalam tahun 1949, menyatakan bahwa (Peter, 1964):

“mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh (probably for the first time in history democracy is claimed as the proper ideal description of all system of politic and social organizations advocated by influential proponents)”.

Hampir semua negara telah menerapkan definisi dan kriterianya dalam demokrasi, tidak sedikit juga yang justru mendorong dengan cara yang tidak demokrasi pula, walaupun di atas kertas menyebut “demokrasi” sebagai dasarnya yang fundamental. Maka dari itu, studi mengenai politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi dapat dibedakan menjadi demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealisme tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaan di lapangan tidak selalu sesuai dengan gagasan normatifnya (Huda, 2005, p. 260).

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas tentang sejarah demokrasi. Pada masa ini demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain (Huda, 2005, p. 263): demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari banyaknya aliran pemikiran tentang demokrasi, adanya dua kelompok yang terpenting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Terdapat perbedaan fundamental di antara kedua kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional memiliki tujuan yakni pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, artinya suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang berdasarkan dirinya sebagai komunisme, memiliki tujuan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.

Ciri khas dari demokrasi konstitusional yakni gagasan berupa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan dalam bertindak semaunya atau sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan negara dibagi sedemikian rupa, hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar penyalahgunaan diperkecil, yaitu dengan cara tidak memusatkan pada satu pemerintahan atau satu badan saja. Perumusan yuridis dan prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dan Rule of Law (Huda, 2005, p. 265).. Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis. Kata Marx dan Engels: “ Negara tidak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain” dan “negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.” Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni“matul Huda di

dalam bukunya “Hukum Tata Negara Indonesia”, memberi defenisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut (Huda, 2005, pp. 265-267):

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic alection which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Kemudian Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni:

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society)
3. Menyelenggaran pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Sementara menurut Nurcholis Madjid, ternyata pandangan hidup demokrasi haruslah didasari atas tujuh norma sebagai berikut (Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, p. 113):

1. Kesadaran atas pluralisme Masyarakat sudah dapat memandang secara positif kemajemukan dan keberagaman dalam masyarakat, serta telah mampu mengelaborasi ke dalam sikap tindak secara kreatif.
2. Musyawarah Korelasi prinsip ini ialah kedewasaan untuk menerima bentuk-bentuk kompromi dengan bersikap dewasa dalam mengemukakan pendapat, mendengarkan

pendapat orang lain, menerima perbedaan pendapat, dan kemungkinan mengambil pendapat yang lebih baik.

3. Pemufakatan yang jujur dan sehat Prinsip masyarakat demokrasi dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufakatan yang juga jujur dan sehat, bukan permufakatan yang dicapai melalui intrikintrik yang curang, tidak sehat atau yang sifatnya melalui konspirasi.
4. Kerjasama Prinsip kerjasama antar warga dalam masyarakat dan sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, kemudian jalinan dukungmendukung secara fungsional antar berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, merupakan segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi Untuk mendukung hadirnya situasi demokrasi dalam masyarakat sangat perlu memperhatikan pemenuhan segi-segi ekonominya terutama pemenuhan terhadap keperluan pokok, yaitu pangan, sandang dan papan. Pemenuhan kebutuhan ekonomi harus pula mempertimbangkan aspek keharmonisan dan keteraturan sosial (seperti masalah mengapa kita makan nasi, bersandingan sarung, kopiah, kebaya, serta berpapankan rumah „joglo“ yang dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya).
6. Pertimbangan moral Pandangan hidup demokratis mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara berdemokrasi haruslah sejalan dengan tujuan. Bahkan sesungguhnya klaim atas suatu tujuan yang baik haruslah diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya.
7. Sistem pendidikan yang menunjang Pendidikan demokrasi selama ini pada umumnya masih terbatas pada usaha indoktrinisasi dan penyusunan konsep-konsep secara verbalistik. Terjadinya diskrepansi (jurang pemisah) antara das sein dan das sollen dalam konteks ini ialah akibat dari kuatnya budaya ”menggurui” dalam

masyarakat kita, sehingga verbalisme yang dihasilkannya juga menghasilkan kepuasan tersendiri dan membuat yang bersangkutan merasa telah berbuat sesuatu dalam penegakan demokrasi hanya karena telah berbicara tanpa perilaku.

Namun menurut Robert. A. Dahl, yang diikuti Muntoha dalam jurnalnya yang berjudul “Demokrasi dan Negara Hukum” menyatakan, Demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu (Muntoha, 2009):

1. Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat
2. Partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif
3. Pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis
4. Kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat
5. Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Kemudian diikuti dengan pandangan lain, demokrasi merupakan suatu gagasan politik sebagai paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut (Gaffar, 2005, p. 15):

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya

3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam menjalankan demokrasi tentunya diperlukan berbagai lembaga yang demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.

Untuk dapat melaksanakan demokrasi harus perlu bantuan dari beberapa lembaga yang nantinya dapat melaksanakan nilai-nilai tersebut, yaitu (Huda, 2005, p. 267):

1. Suatu pemerintahan yang bertanggung jawab
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang dapat mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Itulah landasan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada prinsip persamaan dan kesederajatan manusia.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ini menggunakan metode kualitatif. Hal tersebut digunakan karena kajian dan permasalahan dapat dikaji melalui data-data yang di dapat karena menurut pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tidak terlihat dibalik suatu fenomena yang seringkali susah untuk di pahami secara memuaskan, dan dalam mencari teknik pengumpulan data penulis melakukan penelaahan kepustakaan dengan benar yang memanfaatkan data sekunder yang di peroleh dari buku-buku, jurnal. Surat kabar (koran), website resmi, dan juga tulisan-tulisan yang membahas tentang permasalahan yang terkait dalam skripsi, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun data-data sekunder yang di peroleh dari perpustakaan agar bisa mendukung penelitian ini sesuai dengan topik yang dikaji dan dapat di uji kebenarannya dan pembakuan instrument, adanya analisis data dan kemudian penulisan laporan (Yusuf, 2014, p. 46)

Hasil dan Diskusi

Hubunganantara kedua negara Amerika Serikat dan juga Irak sudah tejalin sejak lama diawali dengan perang Iran-Irak yang dimana sebenarnya sebelum invasi Irak ke Kuwait terjadi Amerika Serikat adalah negara yang memperkuat rezim Saddam Hussein pada perang Iran-Irak dengan bantuan dana militer dan persenjataan. Amerika Serikat mendukung Irak untuk menjadi sekutu namun sejak terjadinya invasi Irak ke Kuwait yang secara tidak langsung memberi dampak besar bagi bisnis Amerika Serikat yang berhubungan langsung dengan Kuwait dalam bisnis minyak, Amerika Serikat secara langsung memihak Kuwait dan memukul Mundur Irak, karena pada saat itu Irak menginvasi Kuwait karena ingin merampas ladang minyak yang ada di Kuwait karena Irak kekurangan pasokan untuk membiayai perang antar negaranya dan Iran.

Irak adalah salah satu negara yang menjadi perhatian Amerika Serikat dalam segi kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat dan menyita perhatian masyarakat dunia yang lainnya pada saat kepemimpinan Presiden George W. Bush yang membuat kebijakan yang mana pada tahun 2003 Presiden Bush menginvasi Irak dan juga setelah itu berlanjut ke pemimpin selanjutnya Barack Obama dan juga masih menjadi perhatian dari Politik Luar Negeri Amerika Serikat namun kali ini berbeda yakni kebijakannya mengarah kepada membuat Irak menjadi negara yang aman dari terorisme dan juga stabil terhindar dari hal-hal negatif kemudian memerangi kelompok-kelompok ISIS yang sudah ada di Irak.

Kemudian serangan yang terjadi pada 19 Maret 2003 yakni invasi Amerika Serikat terhadap Irak ini didasari oleh kepentingan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Dengan menggulingkan rezim Saddam Husein dan ingin menggantikan pemerintahan Irak dengan pemimpin yang lebih pro terhadap Amerika Serikat dan sistem yang paling cocok dengan keinginan Amerika Serikat adalah sistem demokrasi yang pemimpinnya akan diusung yang pro terhadap Amerika Serikat agar perusahaan-perusahaan swasta Amerika Serikat dapat mengelola minyak yang semakin berkembang di Irak. Dan Agresi Amerika Serikat adalah alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kepentingan nasional adalah salah satu faktor invasi Amerika terhadap Irak yakni kepentingan atas "*Global war on terror*" yang disebabkan oleh tragedi 9/11 yang menyebabkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat kearah untuk meningkatkan "*struggle of power*" untuk mendapatkan hegemoni globalnya di Timur Tengah. Amerika Serikat juga ingin menguasai minyak Irak dan juga ingin membangun pangkalan militer di Irak karena kawasan ini adalah kawasan yang sangat strategis di kawasan Timur Tengah yang dapat mengontrol negara-negara di kawasan tersebut. Kemudian yang terakhir faktor invasi ini adalah mengembalikan hegemoni global karena tragedi 9/11 yang menjadikan kegagalan Amerika Serikat dalam menjaga keamanan nasionalnya yang menurunkan kepercayaan global terhadap kekuatan Amerika Serikat sehingga Irak yang

dianggap “*grave and gathering danger*”. Agresi militer AS terhadap Irak bertujuan untuk menunjukkan kekuatan AS kepada dunia bahwa AS merupakan negara yang kuat dalam segala aspek.

Setelah turunnya Saddam Husein pada 2003 Amerika Serikat langsung mempercepat gerakannya untuk membenahi Irak dengan memulai dari membangun terlebih dahulu Irak. Menurut laporan yang *publish* pada *cbsnews*, dana kurang lebih dari \$60 miliar sudah diberikan untuk membangun kembali Irak yang sudah porak-peranda akibat perang. Sebanyak \$2,4 miliar dicairkan untuk perbaikan di bidang pengairan, kelistrikan, juga termasuk sektor lainnya antara lain makanan, kesehatan dan tanggungan bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal pascaperang.

Lalu setelah membangun Irak, Amerika Serikat akan fokus pada pemilihan umum untuk sementara yakni mengajukan pemimpin transisi di Irak Setelah Saddam Hussein yang ditaktor turun dari jabatannya, namun bukannya Irak menjadi damai tapi Irak menjadi negara yang penuh dengan kekerasan dan lebih miris kekerasan itu adalah perang saudara antara kelompok Sunni, Syi’ah dan Kurdi serangan ini yang mengakibatkan seluruh kota menjadi lumpuh hingga reporter Irak mengalami kesulitan untuk mengakses berita karena serangan militer yang juga dilakukan Amerika Serikat secara bertubi-tubi. Ternyata perubahan sosial yang muncul diakibatkan dampak dari Invasi Amerika Serikat terhadap Irak ini sangat parah salah satunya adalah ketakutan akan meletusnya perang saudara diantara masyarakat Irak sendiri, yang mana perang terjadi antara pendukung setia dari Saddam Husein dengan kelompok yang kontra terhadap beliau, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Irak terbagi atas dua kelompok besar terlihat dari sikap yang mereka tunjukkan terhadap Saddam Hussein, yakni kelompok utama dari pendukung hingga pengikut partai Baath sebuah partai terbesar yang digunakan sebagai wadah politik semasa pemerintahan Saddam Hussein, kemudian kelompok kedua ini adalah orang-orang yang kontra terhadap Saddam Hussein dan

umumnya orang-orang ini bermazhab Syi'ah di Irak, karena mereka menilai bahwa pemerintahan Saddam Hussein ini sangat ditaktor dan bertindak semaunya akan orang-orang yang mengikuti mazhab Syi'ah (Almudarris, 2004, p. 121).

Dari pihak internasional pun sangat memprihatinkan atas konflik tersebut yang telah memberi dukungan atas pemecahan permasalahan yang terjadi, yang mana beberapa tokoh melihat bahwa keterkaitan internasional dalam permasalahan di anggap sangat penting untuk mendapatkan jalan keluar dari konflik ini, namun telah banyak yang telah terlibat atas konflik ini secara langsung maupun tidak langsung belum juga memperlihatkan hasil yang menyenangkan bahkan keterlibatan tersebut semakin membuat ketidakstabilan dalam politik dan keamanan di Irak yang menghasilkan pada konflik berlandaskan sektarian (Cordesman, 2006, p. ii)

Walaupun invasi yang dilakukan oleh Presiden Bush itu untuk mendorong Irak menjadi negara yang di dasari oleh sistem demokrasi namun cara-cara yang dilakukan Presiden Bush itu tidak mencerminkan demokrasi, Agresi militer ini ditujukan sesuai dengan namanya yakni Operation of Iraqi Freedom yang bertujuan untuk membebaskan rakyat Irak dari rezim Saddam Husein yang otoriter , namun pada kenyataannya cara yang ditunjukkan oleh Presiden Bush ini tidak lazim karena biasanya invasi yang ingin meruntuhkan sebuah rezim biasanya dilakukan oleh para pemimpin yang otoriter dan fasis. Pada umumnya kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan militer biasanya bertujuan untuk dapat membungkam suara-suara kritis dalam masyarakat, militer ini digunakan untuk semata-mata menjamin dan memperpanjang kekuasaan suatu rezim. Maka dari itu agresi militer yang dilakukan ini hanya bermaksud untuk menumbangkan suatu rezim dan kemudian membangun system yang baru dan biasanya system demokrasi lah cocok untuk di terapkan karena seringkali demokrasi ini hanya sebagai alat untuk memperpanjang kepentingan tertentu (Winarno, 2014, p. 111).

Dengan kata lain usaha yang diberikan Amerika Serikat untuk mengeluarkan kebijakan luar negerinya dalam melakukan invasi terhadap Irak untuk menguatkan pengaruh politiknya di Irak agar mudah dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan mendorong terjadinya perubahan politik yakni menuju proses demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dengan dukungan internasional yang menganggap bahwa Irak adalah negara yang mempunyai senjata pemusnah massal dan juga menciptakan teroris yang akan memberikan ancaman bagi dunia, namun setelah di lihat lebih jelas lagi kebijakan ini lebih dalam, ternyata tujuan Amerika Serikat ini untuk bagaimana kepentingan Amerika Serikat di wilayah tersebut tidak terancam, menurut Henry B. Mayo demokrasi menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat dan menyelenggarakan pengganti pemimpin secara teratur kemudian membatasi pemakaian kekerasan. Dan pada kenyataannya kebijakan ini diambil karena kepentingan Amerika Serikat akan terancam di kawasan tersebut.

Dan pada akhirnya Irak sekarang berdiri sendiri dengan ketidak stabilan politik dalam negerinya, beberapa tentara Amerika Serikat memang masih menduduki negara tersebut pangkalan militernya pun masih berdiri karena membantu Irak untuk membasmi terorisme yakni ISIS pada saat 3 tahun pertempuran terjadi antara pemerintah Irak dan juga ISIS yang menjanjikan terhadap rakyat Irak kemenangan yang hakiki dimana ISIS berjanji akan membentuk pemerintahan yang bersih tidak korupsi dan bersih tidak seperti sekarang yang mana korupsi merajalela dan kekacauan social politik lainnya, namun setelah kemenangan di menangkan oleh Irak, dikatakan oleh Perdana Menteri Irak Adel Abdel Mahdi bahwa "jika kita tidak menghilangkan korupsi, kemenangan kita akan berkurang", ini mengartikan bahwa Irak kini menghadapi tantangan yang lain termasuk 1,8 juta orang masih terlantar, dan 8 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, pengangguran yang semakin meluas, dan juga korupsi yang terus merajalela, sementara itu juga Irak merupakan negara terkorup nomor 12 di dunia versi Transparency International. Kemudian negara Irak masih juga krisis politik dimana ditandai dengan pemilihan parlemen pada Mei 2018, tidak menghasilkan koalisi yang jelas, dengan

perpecahan politik untuk melumpuhkan upaya Perdana Menteri Mahdi mengisi posisi-posisi kunci cabinet (Yasinta, 2018).

Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan terjawablah hipotesa yang akan di temukan pada bab keempat dimana hipotesa tertulis di awal pada bab satu yakni pengaruh Amerika Serikat semakin dominan secara politik agar kepentingan Amerika Serikat dapat tercapai dengan tujuan ingin menguasai ladang minyak di Irak dengan cara mendorong Irak menjadi negara yang lebih demokrasi agar pemimpin yang terpilih sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, sejak pergantian pemimpin Amerika Serikat yakni Barack Obama yang merubah kebijakannya kearah *soft power* karena kepentingan telah tercapai, pada masa Obama kebijakan yang dibuat telah berubah yakni dengan strategi mempertahankan kerjasama yang telah dibuat agar kepentingan Amerika Serikat tidak terancam lagi, berbeda dengan kebijakan yang di berikan presiden sebelumnya yakni George W. Bush yang kearah *hard power* dimana kebijakan yang mengirimkan ribuan tentara Amerika ke Irak pada saat pemerintahan Presiden Bush, setelah pemilu pertama usai pada tahun 2005 Irak masih saja menjadi negara yang tidak stabil, masih saja terdengar adanya perang saudara yang masih merebutkan kursi di pemerintahan. Setelah 10 tahun pasca invasi, Presiden Barack Obama menarik sebagian besar tentara dan juga jumlah diplomat Amerika Serikat di Irak. Dari segi pengaruh politik Amerika Serikat tidak begitu mau ikut campur lagi apalagi ketika perpecahan yang terus berlanjut antara pemerintah di Baghdad dan para pemimpin Kurdi yang semi otonom di Irak Utara, tapi dari segi ekonomi Amerika Serikat berhasil dan beruntung dari privatisasi sebagian besar minyak di Irak (Stearns, 2013).

Kini kondisi dari Irak sendiri tidak cukup stabil dimana rezim yang berkuasa setelah jatuhnya rezim Saddam Husein ternyata melakukan banyak korupsi, dan juga ribuan masyarakat Irak masih mengungsi dan butuh bantuan kemanusiaan dan diakhiri dengan

tantangan yang masih menjadi PR besar bagi Irak yakni menyediakan lapangan pekerjaan yang luar dimana pengangguran semakin besar terjadi.

Demokratisai tidak menjamin Irak akan lebih baik dari sebelumnya jadi walaupun ada negara yang ingin mendorong suatu negara menjadi demokrasi maka pikirkan baik-baik dampak yang diakibatkan oleh perubahan tersebut karena belum tentu suatu negara itu di pimpin berdasarkan sistem demokrasi. Karena contohnya Irak pada saat Saddam Husein memimpin negara itu tidak ada terdengar perang saudara, namun sejak jatuhnya Saddam Husein dan mengusung sistem demokrasi perang saudara pecah di negara Irak.

Daftar Pustaka

- Almudarris, A. (2004). *Huru Hara Irak*. Yogyakarta: Cahaya Hikma.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Cordesman, A. H. (2006). *Iraq's Evolving Insurgency and The Risk of Civil War*. Washington D.C: Center for Strategic and International Studies.
- Daulay, R. M. (2009). *Amerika VS Irak "Bahaya Politisasi Agama"*. Jakarta: Penerbit Libri.
- Gaffar, A. (2005). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maulana, V. (2018). *Jimmy Carter: Tindakan AS di Timur Tengah Mendekati Kejahatan Perang*. Washington: SINDOnews.com.
- Mauna, B. (2005). *Hubungan Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P. T Alumni.
- Muntoha. (2009, Juli). Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum*, 13, 3.
- Peaslee, A. J. (1950). Constitutions of Nation. *Nederlands Tijdschrift Voor Internationaal Recht*, 1, 417-418.
- Peter, S. B. (1964). *Principle of Political Thought*. New York: Colliner Book.
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah: Kebijakan AS dan Israel atas Negara-Negara Muslim*. Jakarta Selatan: Mizan Publika.
- Stearns, S. (2013). *10 Tahun Pasca Invasi: AS Tak Lagi Miliki Pengaruh di Irak*. Timur Tengah: VOA Indonesia.
- Tim ICCE UIN Jakarta. (2003). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Winarno, B. (2014). Satu Dekade Pasca Invasi AS di Irak. *Journal UMY*, 111-112.
- Yasinta, V. (2018). *Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?* Baghdad: Kompas.com.
- Yusuf, A. (2014). *Metode Penelitian; kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Kencana.